JPM Vol 2 / No.3 /2021

Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

PERAN DISPERKIM KOTA MAGELANG DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DAN PROGRAM 100-0-100

THE ROLE OF DISPERIMENT CITY OF MAGELANG IN SUCCESS CITY PROGRAMS WITHOUT SLUMS (KOTAKU) AND PROGRAMS 100-0-100

Cahyo Adhi Indra Ferdiansyah
Universitas Tidar
✉ Cahyoferdiansyah@gmail.com

Abstrak

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, dengan menggunakan 7 indikator pengukuran tingkat kekumuhan. Output yang nantinya akan dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil analisis spasial berupa peta permukiman kumuh, yang menggunakan metode klasifikasi natural breaks dengah kategori tidak kumuh, kumuh sedang, kumuh berat pada Kota Magelang serta perbandingan antara hasil pengolahan AHP dengan data dari KOTAKU. Menggunakan indikator kondisi bangunan gedung sebagai indikator yang paling mempengaruhi kondisi kekumuhan yang di susul dengan kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi jalan permukiman, kondisi proteksi kebakaran, dan kondisi drainase.

Kata kunci: drainase,kotaku,permukiman.

Abstract

The City without Slums Program (KOTAKU) is one of a number of strategic efforts by the Directorate General of Human Settlements of the Ministry of Public Works and Public Housing to accelerate the handling of slums in Indonesia, using 7 indicators measuring slum levels. The output that will be generated from this research is the results of spatial analysis in the form of slum maps, which use the natural breaks classification method with no slums, medium slums, heavy slums in Magelang City and a comparison between the results of AHP processing with data from KOTAKU. Using the indicator of building conditions as the indicator that most influences the conditions of slums which is followed by the condition of drinking water supply, the condition of wastewater management, the condition of waste management, the condition of residential roads, the condition of fire protection, and drainage conditions.

Keywords: *drainage,kotaku, settlement*

Pendahuluan

Jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 120.995 jiwa yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0,52% dengan sex ratio 97,12. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia idealnya yaitu sekitar satu sampai dua juta per tahun namun saat ini laju pertumbuhan penduduk berada diatas angka ideal yaitu mencapai 1,49 persen atau sekitar empat juta per tahun. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan berkembangnya permukiman yang tidak terkontrol, terutama hunian liar atau permukiman kumuh yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman khususnya didaerah perkotaan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia, dengan menggunakan 7 indikator pengukuran tingkat kekumuhan, namun setiap indikator permukiman kumuh belum memiliki bobot yang jelas karena bobot kriteria yang digunakan masih bersifat subjektif. Perbandingan dilakukan dengan memberikan bobot untuk 7 indikator kekumuhan yang ada menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan metode yang tepat digunakan karena pada AHP menggunakan multicriteria yang dibandingkan dengan alternatif, sehingga mengurangi kesubjektifan dalam penentuan bobot kriteria. Output yang nantinya akan dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil analisis spasial berupa peta, yang menggunakan klasifikasi natural breaks. Peneliti menggunakan klasifikasi ini karena klasifikasi natural breaks melakukan pengelompokan data berdasarkan distribusi data dan dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh pola pewarnaan/klasifikasi yang baik. Pada penelitian ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas tidak kumuh, kumuh sedang, kumuh berat pada Kota Magelang serta perbandingan antara hasil pengolahan AHP dengan data dari KOTAKU. Pada penelitian berjudul “Pemetaan Kualitas Permukiman dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan SIG di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam“, penelitian ini membahas mengenai kualitas pada area permukiman di Kecamatan Batam Kota Batam dengan menggunakan data citra resolusi tinggi (Google Earth). Analsis pada penelitian ini menggunakan metode skoring dan tumpang susun (overlay) dari parameter yang digunakan.

Paramater yang digunakan yaitu kepadatan permukiman, tata letak bangunan, lebar jalan masuk, lokasi permukiman, kondisi jalan masuk, dan pohon pelindung dari interpretasi citra resolusi tinggi (Google Earth) yang menghasilkan peta informasi permukiman di Batam Kota yang di dominasi tingkat kualitas sedang, kualitas baik, dan kualitas buruk merupakan persebaran permukiman yang paling sedikit[3]. Pada hasil laporan berjudul "Laporan Akhir Database Permukiman Kumuh Kota Magelang Tahun 2017" yang membahas mengenai area lokasi tentang persebaran permukiman kumuh pada Kota Magelang dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner di Kota Magelang. Menggunakan 7 buah indikator untuk menentukan nilai kekumuhan yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran. Pembobotan identifikasi masalah di dalam laporan ini ialah kumuh berat memiliki nilai bobot 71 - 95, kumuh sedang memiliki nilai bobot 45 – 70, kumuh ringan memiliki nilai bobot 19 – 44, dan tidak kumuh memiliki nilai bobot <19. Hasil dari laporan ini ialah Kota Magelang memiliki 132 Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan status Kumuh Ringan, dan 115 RT dan RW dengan status Tidak Kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Indikator kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografi. AHP pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Pada dasarnya AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio terbaik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontiniu.AHP sangat cocok dan fleksibel

digunakan untuk menentukan keputusan yang menolong seorang decision maker untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif berdasarkan segala aspek yang dimilikinya. Saaty menyatakan bahwa AHP menyediakan kerangka yang memungkinkan untuk membuat suatu keputusan efektif atas isu kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pendukung keputusan. Pada dasarnya AHP adalah suatu metode dalam merinci suatu situasi yang kompleks, yang terstruktur kedalam suatu komponen komponennya. Artinya dengan menggunakan pendekatan AHP kita dapat memecahkan suatu masalah dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai permukiman kumuh di kota Magelang dengan menggunakan metode AHP. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang telah tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Data tersebut merupakan data hasil analisis dari tim penyusun buku Laporan Akhir Database Permukiman Kumuh Kota Magelang Tahun 2017 yang dijadikan sebagai data sekunder pada penelitian ini. Data yang telah didapatkan tersebut akan diolah dalam bentuk sajian tabel dan di kelompokkan berdasarkan kriteria dan area permukiman kumuh. Analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini menggunakan metode AHP untuk melakukan perbandingan status area kawasan kumuh dengan hasil analisis yang telah dilakukan oleh permerintah Kota Magelang, dilakukannya analisis ini dikarenakan terdapatnya temuan bahwa setiap indikator permukiman kumuh belum memiliki bobot yang jelas karena masih bersifat subjektif untuk tingkat kepentingan disetiap indikatornya. Kriteria atau parameter yang digunakan dalam penilaian ini terdapat 7 indikator yaitu kondisi bangunan gedung, peta kondisi jalan lingkungan, peta kondisi drainase lingkungan, peta kondisi penyediaan air minum, peta kondisi pengelolaan air limbah, peta kondisi pengelolaan persampahan, dan peta kondisi proteksi kebakaran. Sedangkan untuk alternatif yang digunakan terdapat 247 area kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kota Magelang, area kawasan permukiman kumuh tersebut berdasarkan dari pengelompokan area yang berasal dari data sekunder yang didapatkan. Hasil dari perangkingan area kawasan permukiman kumuh pada penelitian ini akan berupa status keterangan, status tersebut ialah tidak kumuh, kumuh sedang, kumuh berat. Pada status keterangan dari hasil analisis pemerintah Kota Magelang terdapat 4 jenis yaitu tidak kumuh,

kumuh ringan, kumuh sedang, kumuh berat. Hasil dari perbandingan tersebut akan di tampilkan sebagai peta informasi yang dapat mengetahui status keterangan dari kedua peta yaitu peta informasi dengan data rangking dari hasil analisis pemerintah Kota Magelang dengan data rangking menggunakan metode AHP.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang memfokuskan penanganan kawasan kumuh pada empat dari 17 kelurahan di daerah itu sebagai bagian dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang mendukung pada pencapaian tersebut.

Beberapa isu-isu penting yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Magelang, yaitu :

a. Masih adanya pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang. Di Kota Magelang saat ini masih terdapat pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang tersebar di setiap Kelurahan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan rumah layak huni terus dilakukan, baik melalui pendanaan pemerintah pusat ataupun dengan stimulant perbaikan kualitas melalui pemberdayaan/swadaya masyarakat.
b. Keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni. Terbatasnya lahan mengakibatkan semakin tingginya harga tanah di wilayah perkotaan. Hal ini karena sebagian besar wilayah Kota Magelang yang mempunyai luas 18,12 km2 hampir dipenuhi oleh pemukiman, perumahan dan bangunan gedung.
c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan permukiman padat. Dengan terbatasnya lahan maka infrastruktur bidang pemukiman dan perumahan harus dioptimalkan yaitu dengan pola pembangunan vertical. Pada tahun 2013 melalui dana yang

berasal dari Pemerintah Pusat di Kelurahan Potrobangsan Kota Magelang dibangun 1 (satu) twinblok RUSUNAWA dan pada tahun 2014 dibangun lagi 1 twinblok di Kelurahan Tidar Utara.

d. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana air bersih lingkungan dan prasarana sanitasi lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun di Kota Magelang mengakibatkan jumlah kebutuhan yang ada juga semakin bertambah, tidak terkecuali pada kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan dan kebutuhan lain seperti jalan lingkungan, air bersih/air minum dan sanitasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan.

LANDASAN TEORI

Menurut Perwal No 33 TH 2016 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Peran Pemerintah

Hal yang sering muncul dalam permasalahan penanganan permukiman kumuh adalah masih lemahnya kapasitas Pemerintah Daerah padahal diakui bahwa peran Pemerintah Daerah memegang peranan penting agar permukiman kumuh dapat meningkat kualitas kehidupan masyarakatnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus

bersinergi agar penanganan permukiman kumuh dapat menjadi prioritas. Hal ini disebabkan kondisi pemerintah daerah pada saat ini masih dirasakan terbatas kapasitasnya untuk mengimplementasikan penanganan permukiman kumuh sehingga peran Pemerintah Pusat masih sangat diperlukan.

Permukiman kumuh timbul di perkotaan karena Pemerintah tidak memiliki kebijakan perumahan, peraturan perundangan dan sistem penyediaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah akibatnya Pemerintah Daerah harus dapat memiliki inisiatif sendiri untuk menangani permukiman kumuh. Masalahnya adalah sangat sedikit Pemerintah Daerah yang mampu dan berkeinginan untuk meningkatkan kualitas hidup di permukiman kumuh. Berbagai pelajaran dari praktik di lapangan di beberapa kota memperlihatkan bahwa diperlukan suatu ‘political will’ agar permasalahan ini dapat tertangani. Bentuk ‘political will’ yang dibutuhkan adalah yang memiliki landasan yang kuat, berjalan dalam jangka panjang sehingga dapat berkelanjutan serta berskala besar (city-wide approach). Namun ‘political will’ juga harus disertai dengan ‘local ownership’ dan kepemimpinan atau adanya ‘champion’ di wilayah tersebut serta harus didukung dengan mobilisasi potensi dan kapasitas dari seluruh pemangku kepentingan yang ada termasuk masyarakat di lingkungan tersebut. Keberhasilan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ‘political will’ yang terpelihara dan komitmen yang kuat akan mendukung keberhasilan penanganan permukiman kumuh.

Dalam era desentralisasi, perumahan telah diserahkan urusannya kepada pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka kebijakan yang terkait dengan perumahan harus dibenahi agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitasnya untuk dapat menjadikan perumahan sebagai sasaran prioritas. Untuk itu diperlukan kebijakan nasional yang dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitasnya agar memiliki dinas/lembaga yang menangani permukiman kumuh secara efektif. Kapasitas pemerintah daerah harus diperkuat agar mampu menjalankan kewajibannya dalam hal penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang berimbang bagi seluruh masyarakat. Tindakan-tindakan untuk memfasilitasi dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan akses pada informasi dan panduan dalam berbagai aspek untuk menangani permukiman kumuh. Selain itu

juga diperlukan peningkatan tata kelola pemerintahan dan manajemen kota-kota di setiap level yang berujung pada pemerintah daerah yang lebih responsif terhadap isu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tinggal di permukiman kumuh

Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Nomor 1 tahun 2011) isinya antara lain mendesak "pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyediakan anggaran dalam APBN maupun APBD yang cukup besar untuk program pembangunan perumahan bagi masyarakat". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berdasarkan UU tersebut harus sudah mulai merencanakan dan menganggarkan di dalam APBD nya untuk pembangunan perumahan dan termasuk di dalamnya adalah penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari program perumahan di daerahnya. Namun penyerahan tanggung jawab perumahan kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pembahasan lebih jauh tentang seberapa besar kewenangan atas mobilisasi sumber daya boleh dilakukan.

Di dalam implementasinya, penanganan permukiman kumuh membutuhkan peran serta dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, swasta, masyarakat dan LSM serta organisasi lainnya termasuk perguruan tinggi. Partisipasi masyarakat mulai dari konsepsi, pembangunan, pembiayaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur serta pelayanan diperlukan agar penanganan permukiman kumuh dapat berkelanjutan. Pembentukan kemitraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NGO dan pihak swasta, dan organisasi masyarakat (CBO) adalah mutlak diperlukan agar penanganan permukiman kumuh dapat berhasil karena merupakan upaya bersama sehingga dapat menciptakan rasa kepemilikan (local ownership).

Dengan demikian maka peran pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh membutuhkan peningkatan kapasitas, sumber daya manusia dan keuangan, pembentukan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, didukung oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mendorong penanganan permukiman kumuh menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah. Selain itu ada salah satu kunci keberhasilan yang tidak kalah penting yaitu 'political will' dari Pemerintah Daerah, hal ini yang menjadi tantangan untuk dapat menciptakan hal tersebut, apakah dapat melalui edukasi dan

advokasi kepada para Kepala Daerah bahwa prioritas penanganan kumuh akan mengangkat elektabilitasnya pada saat pemilihan kepala daerah

Tagline

Tagline pada tahun 1960-an dikenal dengan sebutan slogan, marketing line atau bahkan trademark line. *Tagline* merupakan kalimat untuk brand potitioning yang menjadi ciri khas, pembeda, dan "bahasa iklan" untuk menarik minat publik. *Tagline* merupakan bagian dari iklan yang bertujuan agar iklan tersebut mudah diingat oleh konsumen. Tagline dalam suatu iklan memegang peranan penting. *Tagline* adalah kalimat singkat sebagai penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat sebagai penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan komunikasi suatu iklan.

Magelang Moncer Serius diluncurkan, 31 Desember 2019. Menjadi tonggak dilaksanakannya 46 event berskala besar yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat fungsi Kota Magelang sebagai kota jasa. Magelang Moncer Serius 2020 menjadi strategi Pemkot dalam rangka menaikkan potensi ekonomi kerakyatan.

Ada empat tahapan program Ayo ke Magelang jilid II, dengan tagline Moncer Serius ini. Mulai dari konsep pariwisata, bertujuan untuk mempromosikan Kota Magelang ke tingkat nasional dan internasional, sehingga akan menambah daya saing kota sehingga mampu menarik investor. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan event-event yang kita agendakan. Karena lewat pariwisata, maka dampaknya Kota Magelang jadi terkenal, memiliki daya saing dan daya jual tinggi, sehingga akan menarik investor untuk berbisnis.

Moncer serius memiliki lima tahapan jalannya kegiatan sepanjang tahun 2020. Kelima tahapan itu meliputi awal tahun berupa Ayo Moncer Serius (Januari-Februari), berlanjut pada Pesona Moncer Serius (Maret-Mei). Lalu pada penghujung semester pertama, yaitu Moncer untuk Negeri (Juni-Agustus), kemudian dimulai bulan September-Oktober akan diadakan Moncer Sejuta Bunga, dan terakhir adalah Terus Moncer Serius (Desember).

Peningkatan stay para wisatawan ini sudah pasti akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena dengan begitu, UMKM kita akan laku keras, dan Kota Magelang akan

dikenal karena mampu membuktikan para tamu yang datang pasti betah tinggal.

METODE

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model analisis deskriptif yang mana dalam penelitian ini menggambarkan dan menganalisa objek atau subjek yang akan diteliti. Data deskriptif berasal dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati bukan berupa angka-angka serta rumus-rumus statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain: wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrument penelitian yang digunakan ialah: pedoman wawancara, alat perekam, kamera.

Dalam pengambilan sumber data, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas PERKIM Kota Magelang sebagai informan melalui teknik *purposive sampling*. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Foto, brosur, *leaflet*, internet, buku cetakan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pariwisata Kota Mageleng terutama program Ayo Ke Magelang 2020 dengan *tagline* Magelang Moncer Serius.

Dalam penelitian ini, data dianalisa sdengan menggunakan model interakti, yaitu analisa yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Fokus penelitian ini yaitu mengenai upaya atau peran DISPERKIM Kota Magelang dalam mensukseskan program Ayo Ke Magelang 2020 dengan *tagline* Magelang Moncer Serius" yang meliputi:

1. Upaya yang dilakukan DISPERKIM Kota Magelang dalam mensukseskan Magelang Moncer Serius.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Magelang Moncer Serius.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembahasan Terhadap Rumusan Masalah

1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Kota Magelang masih memiliki 37,201 hektar kawasan kumuh yang tersebar di 15 kelurahan, dari 17 kelurahan yang ada berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, basis kumuh tersebut diukur berdasarkan perumahan yang masih dibawah standar, tidak memadainya akses

infrastruktur dasar seperti air, sanitasi dan jalan, tidak hanya itu basis kumuh juga diukur berdasarkan kesehatan lingkungan yang buruk serta kerentanan terhadap bencana alam.

Perlu kita ketahui bahwa progam KOTAKU ini merupakan progam nasional yang bersifat strategis oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bertujuan untuk mengatasi percepatan penanganan kawasan pemukiman kumuh disetiap daerah. Namun penanganan pemukiman kumuh ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan penanganan secara bertahap dan tepat sasaran, selain itu yang menjadi tantangan dari program ini adalah bagaimana pemerintah dapat menggunakan anggaran tersebut secara tepat dan efisien agar pelaksanaan pembangunan pemukiman kumuh disetiap daerah dapat terlaksana. Pelaksanaan progam pembangunan KOTAKU ini dilaksanakan berdasarkan "Gerakan 100-01-100, yaitu 100 persen universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak". Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa progam ini merupakan progam yang sangat strategis untuk segera menangani permukiman kumuh disetiap daerah.

Progam KOTAKU merupakan sebuah program nasional yang akan dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten atau kota, pada11.067 desa atau kelurahan. Dari 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten atau kota tersebut, Kota Magelang yang menjadi tempat magang riset kami merupakan kota yang sedang menjalankan progam KOTAKU. Kota Magelang merupakan kota wisata yang terkesan sangat indah, namun dibalik keindahan kota tersebut masih terdapat kawasan permukiman kumuh di berbagai tempat.secara garis besar, implementasi progam KOTAKU ini memiliki tujuan umum, yakni meningkatkan sarana infrastruktur yang layak dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan

berkelanjutan. Adapun maksud yang terkandung dalam tujuan umum tersebut, yang pertama adalah berkaitan dengan perbaikan akses sarana dan prasarana infrastruktur serta perbaikan fasilitas pelayanan umum, sedangkan yang kedua adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat tersebut, perlunya pengembangan secara berkelanjutan sebagai basis untuk membantu masyarakat.

Di Kota Magelang sendiri, dari 17 kelurahan baru dua kelurahan yang terbebas dari kawasan kumuh antara lain Jurangombo Utara dan Kramat Selatan. Selebihnya, hampir merata di semua kelurahan terdapat kawasan kumuh. Perlu ada upaya peningkatan penyadaran terhadap warganya dalam membangun sistem sanitasi yang baik. Sebab sampai saat ini belum semua warga punya kesadaran untuk membuat sistem sanitasi sesuai standar dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Oleh karena itu dengan mengacu dari tujuan umum tersebut, progam KOTAKU memiliki 7+1 indikator kumuh yang wajib dipenuhi sebagai dasar dalam pelaksanaan progam KOTAKU. Indikator tersebut meliputi :

1. Bangunan Gedung
   - Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk;
   - Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
   - Ketidaksesuaian dengan persayaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan.

2. Jalan Lingkungan
   - Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
   - Lebar jalan yang tidak memadai;
   - Kelengkapan jalan yang tidak memadai.

3. Penyediaan Air Minum

    - Ketidaktersediaan akses air minum;
    - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
    - Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

4. Drainase Lingkungan

    - Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan
    - Menimbulkan bau;
    - Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.

5. Pengelolaan Air Limbah

    - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;
    - Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
    - Tercemarnya lingkungan sekitar.

6. Pengelolaan Persampahan

    - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;
    - Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
    - Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.

7. Ruang Terbuka Publik

    - Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);
    - Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau/ruang terbuka publik (RTP).

8. Pengamanan Kebakaran

    - Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
    - Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
    - Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.

Seperti yang kita lihat diatas bahwa dalam rangka untuk membangun pemukiman kumuh perlu kiranya untuk memeperhatikan beberapa macam indikator yang menjadi acuan agar dapat dikategorikan sebagai pemukiman kumuh. Untuk mengidentifikasi hal seperti ini tim pelaksana harus benar-benar selektif dalam mengkategorikan mana yang tergolong pemukiman kumuh dan mana yang bukan.

Dari beberapa indikator pemukiman kumuh diatas, terdapat salah satu indikator yang

menjadi fokus pembahasan peneliti. Adapaun fokus yang menjadi riset peneliti yakni berkaitan dengan drainase lingkungan. Sesuai dengan judul riset peneliti yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Memperbaiki Drainase di Lingkungan Kota Magelang" penulis meyakini bahwa terdapat keterkaitan antara progam KOTAKU dengan perbaikan drainase yang dilakukan oleh tempat magang riset kami. Setelah melihat bahwa drainase merupakan salah satu indikator diatas, maka perbaikan drainase ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki akses sarana infrastruktur yang rusak karena adanya bencana alam. kerusakan ini biasanya terjadi karena faktor luapan air yang besar yang disebabkan karena curah hujan tinggi, sehingga drainase tersebut tidak mampu untuk menahan luapan air sehinggan tanggul drainase menjadi jebol dan mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, dalam riset peneliti kali ini, sebagai bagian dari wujud implementasi progam KOTAKU, peneliti akan membahas tentang upaya Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magealang dalam melakukan perbaikan drainase di lingkungan Kota Magelang.

2. Pemahamam Mengenai Permasalahan Drainase dan Sanitasi

Adapun secara teoritis, drainase ini pada dasarnya berasal dari bahasa inggris yaitu *drainage* yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam konteks pemanfaatan tertentu.

Mengacu dari pengertian tersebut, drainase dapat kita pahami sebagai langkah yang dilakukan dalam upaya mengalihkan air yang berlebihan. Dalam hal ini, mengalihkan luapan air yang disebabkan oleh curah hujan tinggi untuk menghindari terjadinya banjir sehingga dibangunnya drainase di kawasan pemukiman tidak lain

sebagai pencegah atas terjadinya banjir yang disebabkan oleh luapan air yang tidak terkontrol dengan baik. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kebanyakan pembangunan drainase ini seringkali tidak mampu menahan luapan air.

hujan. Penulis beranggapan, kemungkinan yang terjadi adalah karena masyarakat pada umumnya seringkali membuang sampah dialiran drainase tersebut, sehingga lambat laun sampah tersebut menumpuk dan pada akhirnya drainase tidak mampu menahan luapan air yang yang mengakibatkan drainase jebol dan kemudian menyebabkan banjir. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu kiranya drainase ini harus selalu diperbaiki agar drainse tesebut menjadi lebih terawat dan kuat dalam menahan luapan air hujan.

Pengertian Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi “Sanitasi” adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian Sanitasi adalah lingkungan cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara.

Ruang Lingkup Sanitasi meliputi beberapa hal, di antaranya (1) Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik, (2) melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan ganggu.

rhadap kesehatan fisik maupun mental, (3) mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular, (4) mencegah terjadinya kecelakaan, dan (5) menjamin keselamatan kerja.

Tujuan Sanitasi, antara lain: (1) memperbaiki, mempertahankan, dan mengambalikan kesehatan yang baik pada manusia, (2) efisiensi produksi dapat dimaksimalkan, serta (3) menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia.

Adapun permasalahan sanitasi yang telah terjadi di Kota Magelang, yakni sebanyak 1.653 kepala keluarga di Kota Magelang hingga saat ini masih belum memiliki sanitasi yang layak. Kesadaran yang kurang dari warga menjadi salah satu penyebab utama kondisi tersebut. Kesadaran masyarakat kurang, kemudian budaya yang sudah ada sejak lama seperti buang air besar (BAB) di sungai. Pendidikan dan ekonomi juga menjadi faktor penyebab sanitasi kurang layak.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Magelang telah mengalami banjir sebanyak 25 kali setelah tiga tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2014 hingga 2016. Hal ini membuktikan bahwa Kota Magelang yang merupakan daerah yang memiliki wilayah permukaan lebih tinggi daripada Kota Malang dan Kabupaten Malang masih saja mengalami banjir. Hal ini biasanya terjadi karena debit air yang meluap sangat tinggi sehingga drainase tidak dapat menahan beban tingginya luapan air tersebut. Berdasarkan dari informasi tersebut, disamping karena faktor luapan air yang tinggi, hal ini juga disebabkan karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah. Banyaknya sampah yang ditemukan menumpuk diwilayah tersebut membuktikan bahwa tanggul drainase jebol dan menyebabkan banjir karena tidak

mampu menahan sampah yang begitu banyak.

3. Analisis Hasil Riset Mengenai Implementasi Kebijakan Program KOTAKU dalam Memperbaiki Drainase dan Sanitasi di Lingkungan Kota Magelang

Dalam pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan hasil riset tentang implementasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang selaku OPD yang menangani secara langsung sarana sanitasi di Kota Magelang dalam melakukan perbaikan maupun pembangunan sanitasi kareana masih banyak terdapat kelurahan yang belum memiliki sanitasi yang layak.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan program KOTAKU dalam memperbaiki drainase di lingkungan Kota Magelang ini, peneliti mengacu pada teori Edward III sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

A.Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Berdasarkan riset peneliti mengenai implementasi program ini, upaya pemecahan masalah dalam melakukan perbaikan drainase di Kota Magelang ini juga dilakukan melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana dua lembaga ini merupakan implementor dari program yang sedang berjalan. Membangun sebuah komunikasi diantara dua pihak ini merupakan

hal penting agar tujuan kebijakan yang telah dirumuskan berjalan seperti semestinya. Pihak Dinas PUPR sebagai penggerak program ini juga melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Dalam hal ini Dinas PUPR membentuk sebuah komunikasi dengan masyarakat melalui proses sosialisasi.

Proses komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi forum, dimana perwakilan dari setiap RT ditiap kelurahan akan melakukan forum dengan pihak Bappeda dan kemudian mereka akan menyampaikan sarana dan prasarana apa saja yang kurang diwilayah mereka, jika permasalahan tersebut memang membutuhkan bantuan dari pihak Pemerintah maka Pemerintah akan turun membenahkan sarana dan infrastruktur yang rusak, namun jika masih bisa ditangani sendiri oleh masyarakat maka masyarakat Pemerintah tidak akan terlibat.

Proses sosialiasi juga dilakukan pada saat pihak Dinas PUPR akan melakukan survey diwilayah yang akan dilakukannya perbaikan. Pada saat itulah Dinas PUPR dan masyarakat melakukan musyawarah mengenai perbaikan drainase tersebut. Berkaitan dengan permasalahan anggaran, Dinas PUPR selaku OPD yang bertanggung jawab penuh dalam pembangunan infrstruktur drainase dan sanitasi yang ada di kota Magelang, akan bertanggung jawab dalam membiayai pembangunan drainase ini. Namun sayangnya terakadang anggaran tersebut tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, agar pembangunan tersebut terus berlanjut, Dinas PUPR melakukan negosiasi dengan masyarakat agar pembiayaan perbaikan dilakukan terlebih dahulu dengan pembiayaan dana swakelola desa yang kemudian nantinya pihak Dinas akan tetap mengganti dana swakelola desa. Pentingnya sebuah komunikasi antara Dinas dan masyarakat, sehingga kegiatan seperti ini bisa terlaksana sewaktu-waktu terjadinya kejadian seperti tanggul drainase yang jebol. Perlu

kita ketahui juga, jika anggaran dari Dinas PUPR dan dana swakelola desa tidak mencukupi, maka usulan perbaikan drainase ini akan dialihkan pada perbaikan selanjutnya

B. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena SDM yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Berdasarkan riset yang kami lakukan, bahwa dalam rangka untuk melakukan pemecahan permasalahan ini membutuhkan SDM yang memang berkompeten dibidangnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang merupakan salah satu dinas yang menangani permasalahan secara teknis terutama berkaitan dengan permasalahan drainase. Tidak hanya Dinas PUPR melainkan ada tenaga ahli yang juga yang dibutuhkan dalam perbaikan drainase seperti ini, berdasarkan hasil wawancara kami disebutkan bahwa tenaga ahli dalam perbaikan drainase adalah tukang Magelang yang dimana mereka adalah pekerja buruh yang ditugaskan oleh Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan drainase

Adapun fasilitas sarana pendukung yang digunakan untuk melakukan kegiatan program ini yaitu sarana dan prasarana seperti alat berat. Alat berat yang digunakan ini adalah sebuah *excavator*. Penggunaan alat ini dipergunakan untuk perbaikan drainase yang berskala besar, artinya jika kerusakan drainase tersebut dikatakan parah, maka alat ini dipergunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan perbaikan drainase tesebut. Informan kami, Bapak Agung selaku Kepala Bagian Pembangunan Drainase Kota Magelang, mengatakan bahwa jika dalam perbaikan ini tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan tenaga

manusia, maka dalam peneyelesaian pekerjaan tersebut dapat dibantu dengan alat berat seperti *excavato*.

C. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana Kebijakan

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Sikap para pelaksana kebijakan, dalam hal ini Kementerian PUPR yang memiliki kebijakan program strategis dalam melakukan.

D. Struktur Birokrasi

Pada variabel terakhir ini, struktur birokrasi adalah salah satu hal yang penting dalam menentukan suatu implementasi kebijakan. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Mengenai strukur birokrasi yang ada di Dinas PUPR Kota Magelang, dimana Dinas PUPR selaku birokrasi pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan perbaikan sarana infrastruktur drainase ini, juga melakukan kerjasama dengan masyarakat. Terbentuknya pola hubungan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dengan cara kerjasama menjalankan program ini. Alasan mengapa pihak Dinas PUPR bekerja sama dengan masyarakat karena dalam prosesnya program ini tentu melibatkan masyarakat, selain membantu dalam hal perbaikan drainase juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi

melakukan hal-hal yang dapat membuat tanggul drainase jebol dan menyebabkan banjir.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang tidak hanya berfokus pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melainkan melibatkan beberapa OPD lainnya. Hal ini dikarenakan setiap OPD memiliki penanganan tersendiri. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu OPD yang juga menangani permasalahan kumuh di Kota Magelang lebih memfokuskan diri terhadap penanganan drainase dan jalan. Adapun OPD lain yang terlibat dalam penanganan program KOTAKU ini yakni Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang menangani permasalahan dari segi sanitasi dan Dinas Sosial yang menangani permasalahan sosial karena terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari segi sosial. Setiap lembaga birokrasi mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan programnya.

Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka akan terdapat kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan program KOTAKU ini akan semakin mempermudah penyelesaian

. percepatan program yang sedang berlangsung. Tidak hanya itu, secara tidak langsung implementasi program ini akan berjalan secara beriringan dan efektif.

4. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program KOTAKU dalam Memperbaiki Drainase di Lingkungan Kota Magelang

Seperti yang sudah dijelaskan diatas terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi ketika program dijalankan, permasalahan pertama yang sering dihadapi Pemerintah adalah permasalahan anggaran dimana terhambatnya tupoksi mereka karena anggaran tersebut harus dibagi kepada beberapa desa lainnya sehingga anggaran yang ada tidak mencukupi, faktor kedua karena kesadaran masyarakat yang masih

kurang akan penanganan permasalahan permukiman kumuh, ego masyarakat yang masih tinggi dan kultur masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya. Masyarakat lebih berfokus pada pekerjaan dimana kebanyakan dari mereka memiliki mata.

pencaharian sebagai petani dan pendidikan mereka yang juga rendah sehingga tidak mempedulikan lingkungan dimana hal itu menjadikan kebiasaan bagi masyarakat\

B. **Target atau Fokus Yang Dicapai**

Target yang ingin dicapai peserta magang dalam program magang riset ini adalah mengetahui implementasi kebijakan program KOTAKU dalam memperbaiki sarana drainase di lingkungan Kota Magelang. Berikut poin penting yang dicapai yaitu:

1. Terciptanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
2. Program ini secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti banjir yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu cara untuk mewujudkan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR membentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program (KOTAKU) adalah program nasional yang dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten atau kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan atau melakukan perbaikan akses sarana dan prasarana infrastruktur yang layak di masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi perkotaan yang layak huni.

Indikator program KOTAKU terdiri dari 8 indikator yang salah satunya adalah drainase lingkungan. Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu kota yang menerima fasilitas program ini khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang juga memfokuskan diri terhadap perbaikan drainase di lingkungan Kota Magelang. Permasalahan yang ada akan mudah teratasi dengan adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, maka pelaksanaan kebijakan program ini akan semakin cepat tertangani. Tidak hanya itu, secara tidak langsung implementasi program ini akan berjalan secara efektif karena keterlibatan OPD lain yang juga terlibat sesuai dengan permasalahan yang mereka tangani.

B. Saran

Pemerintah bersama dengan masyarakat melakukan kerjasama melalui program KOTAKU ini, bersama-sama dalam melakukan perbaikandan pembangunan sanitasi tersebut. Dinas PUPR juga akan terus melakukan kontrol dan pemeliharaan terhadap saluran air agar tetap terjaga. Tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan melainkan juga peran masyarakat yang sangat penting akan menjaga lingkungannya. Berapapun anggaran yang diberikan untuk melakukan pembangunan tidak akan ada artinya jika tidak

didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Available: http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentangprogram-kota-tanpa-kumuh-kotaku

Laporan Akhir Database Permukiman Kumuh Kota Magelang Tahun 2017. Magelang: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017.

Pemkot magelang optimis wujudkan 100-0-100 Available : www.suaramerdeka.com/amp/news/baca/201812/pemkot-magelang-optimis-wujudkan-100-0-100

Kota Magelang dalam Angka 2017. Magelang: BPS Kota Magelang, 2017.